

SEKILAS GAMBARAN PELAKSANAAN JKN

Selamat berjumpa kembali.

Edisi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia pada bulan September ini berfokus pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang telah berlangsung sejak 2014. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membayar fasilitas kesehatan (dokter praktik, klinik, rumah sakit) secara prospektif sehingga hal ini mengubah sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh. Dalam system seperti ini, kendali biaya dan sumber daya lain sangat diperlukan. Bahasan mengenai JKN merupakan topik-topik utama dalam berbagai kongres, symposium mau pun seminar di tingkat daerah maupun nasional. Hal ini mengingat pentingnya memastikan keberlangsungan sistem JKN yang efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari biaya kesehatan yang tinggi dan memastikan akses ke pelayanan kesehatan yang bermutu.

Oleh karena itu, bahasan mengenai pelaksanaan JKN tidak pernah ada habis-habisnya. Tinjauan dapat dilakukan dari berbagai sudut, misalnya pembiayaannya, keanggotaannya, kesiapan fasilitas, kerjasama dengan pihak swasta, dan sebagainya. Telah banyak pula penelitian dilakukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana pelaksanaan JKN di berbagai daerah, untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang penguatannya.

Artikel-artikel kali ini akan sejalan dengan semangat untuk membangun system JKN yang lebih kuat, transparan dan akuntabel. Topik bahasan meliputi misalnya berbagai temuan dari hasil kajian literature sampai sejauh ini tentang JKN, pelaksanaan JKN di daerah, pola pemanfaatan JKN untuk kelompok peserta mandiri, pengelolaan dan pemanfaatan dana

kapitasi, dan analisis efisiensi teknis dari dana kapitasi.

Walau pun ini hanya merupakan sebagian kecil dari gambaran pelaksanaan JKN di Indonesia, namun artikel-artikel ini akan membuka wawasan dan pemahaman kita secara lebih mendalam pada topik-topik yang diangkat. Utamanya, artikel-artikel ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dirasakan dan memberikan saran-saran perbaikan ke depan. Namun tentu saja perbaikan tidak otomatis akan terjadi tanpa ada pergerakan yang berarti dari arah komunitas kebijakan dan para pelaksanaannya.

Hal ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua, para peneliti kebijakan, bahwa penelitian yang kita lakukan hendaknya tidak sekedar dilakukan demi menghasilkan sebuah publikasi. Publikasi merupakan hal yang positif karena ini membuka kesempatan bagi kalangan yang lebih luas untuk terpapar dengan informasi dan temuan-temuan penelitian kita. Namun, untuk sungguh-sungguh memperkuat system JKN sesuai dengan yang kita harapkan, rekomendasi penelitian kita hendaknya ditindaklanjuti hingga menjadi perubahan pelaksanaan kebijakan atau bahkan perubahan kebijakan.

Ini merupakan pe-er besar bagi kita semua, dan bukan merupakan pe-er yang mudah. Namun, justru karena itulah kita hendaknya termotivasi untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang applicable dan mampu menggerakkan tindak lanjut dari target audience kita.

Selamat membaca

Shita Dewi - Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan